

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja dapat memengaruhi secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang.
3. Kepatuhan pada perundang-undangan tidak dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang.
4. Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kabupaten Pemalang.

B. Implikasi

Merujuk pada hasil analisis data yang diperoleh dan proses penelitian, maka implikasi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memerhatikan faktor-faktor lain seperti anggaran berbasis kinerja, SPIP, kepatuhan pada peraturan undang-undang, dan kompetensi sumber daya

manusia yang akan membantu para pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sehingga menghasilkan LAKIP sesuai dengan yang diharapkan.

2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pejabat SKPD di Kabupaten Pemalang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran sesuai dengan standarnya. Diadakannya pelatihan secara rutin sesuai tugas dan fungsi masing-masing bagian, mampu meningkatkan keahlian dalam proses kerjanya.
3. Adanya sistem integrasi antar SKPD di Kabupaten Pemalang, bekerja sama dalam pencapaian hasil yang maksimal dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu. Khususnya, dengan adanya sistem yang terintegrasi antar instansi yang memiliki keterkaitan cukup erat dapat membantu proses pencapaian hasil kinerja yang maksimal dan transparan, sehingga menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi yang lebih baik.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Rentang waktu pengisian kuesioner responden yang cukup lama dikarenakan faktor regulasi birokrasi pada masing-masing SKPD dan adanya kesibukan dari beberapa pegawai instansi yang menjadi responden dalam penelitian, menjadikan pengambilan kuesioner tidak konsisten sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Diharapkan regulasi dalam perizinan dan

kepastian waktu pengambilan data pada setiap SKPD di Kabupaten Pematang Jaya dapat lebih mudah.

Perizinan penelitian di instansi pemerintah dikeluarkan oleh kepala dinas masing-masing SKPD, namun kurangnya informasi sehingga beberapa SKPD masih menanyakan kejelasan perizinan dari pemerintah daerah. Perlunya pemberitahuan informasi yang akurat dan menyeluruh pada tiap-tiap instansi pemerintah guna meminimalisir perbedaan persepsi.

